

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan sebuah Bangsa. Di Indonesia, perjalanan sistem pendidikan Nasional telah mengalami berbagai dinamika dan transformasi sejak masa kemerdekaan. Periode awal Orde Baru (1966-1998) menjadi saksi dari berbagai perubahan signifikan dalam kebijakan pendidikan nasional, terutama selama masa kepemimpinan Mashuri Saleh sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1968-1973).¹

Mashuri Saleh, yang diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Pembangunan I era Presiden Soeharto, menghadapi tantangan besar dalam membenahi sistem pendidikan Indonesia yang masih mencari bentuk ideal pasca pergolakan politik 1965. Periode kepemimpinannya bertepatan dengan dimulainya era Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I, di mana pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.² Hal ini menjadikan posisinya strategis sekaligus krusial dalam menentukan arah pendidikan Indonesia.

Pada masa jabatannya, Mashuri Saleh mengeluarkan berbagai kebijakan yang membawa perubahan fundamental dalam sistem pendidikan nasional. Salah satu kebijakan penting yang ia ciptakan adalah standardisasi kurikulum nasional 1968, yang menandai perubahan orientasi pendidikan dari paradigma Manipol USDEK era Soekarno menuju paradigma Pembangunan Nasional era Soeharto. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Indonesia modern.

¹ Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, (Jakarta: Gunung Agung, 1970), hal. 241.

² H.A.R. Tilaar, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995*, (Jakarta: Grasindo, 1995), hal. 123.

Periode 1968-1973 juga ditandai dengan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Mashuri Saleh menginisiasi program pembangunan gedung-gedung sekolah baru, terutama di daerah-daerah terpencil, serta mengembangkan program pemerataan pendidikan melalui berbagai skema bantuan pendidikan. Kebijakan ini sejalan dengan semangat Pelita I yang menekankan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Di bidang pendidikan tinggi, Mashuri Saleh mengeluarkan kebijakan yang mendorong pengembangan universitas-universitas negeri dan swasta. Ia memprakarsai sistem akreditasi perguruan tinggi dan standarisasi kurikulum pendidikan tinggi, yang bertujuan meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi Indonesia. Kebijakan ini menjadi landasan bagi pengembangan pendidikan tinggi Indonesia di masa-masa selanjutnya.

Fokus lain dari kebijakan Mashuri Saleh adalah pengembangan pendidikan kejuruan dan teknologi. Ia meyakini bahwa Indonesia membutuhkan tenaga terampil untuk mendukung program pembangunan nasional. Berbagai sekolah kejuruan didirikan dan diperkuat selama masa jabatannya, dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan pembangunan.³

Dalam konteks politik pendidikan, Mashuri Saleh harus menyeimbangkan berbagai kepentingan, termasuk tuntutan modernisasi pendidikan dan pelestarian nilai-nilai budaya nasional. Ia menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum, serta menjembatani kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.⁴

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Mashuri Saleh tidak terlepas dari konteks sosial-politik era Orde Baru awal. Sebagai bagian dari kabinet teknokrat

³ Wardiman Djojonegoro, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 1996), hal. 156.

⁴ Taufik Abdullah, "Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia" (*Prisma*, No. 8, Tahun III, 1974), hal. 45-53.

Soeharto, ia harus menyelaraskan kebijakan pendidikan dengan agenda pembangunan nasional yang lebih luas. Hal ini tercermin dalam penekanannya pada pendidikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan stabilitas politik.⁵

Dampak dari kebijakan-kebijakan Mashuri Saleh masih dapat dirasakan hingga saat ini. Beberapa program yang ia inisiasi, seperti standarisasi kurikulum nasional dan sistem akreditasi perguruan tinggi, telah menjadi fondasi bagi perkembangan sistem pendidikan Indonesia kontemporer.⁶ Namun, evaluasi kritis terhadap kebijakannya juga perlu dilakukan untuk memahami kelebihan dan kekurangannya dalam konteks historis.

Studi tentang kebijakan pendidikan Mashuri Saleh menjadi penting karena beberapa alasan. Pertama, periode kepemimpinannya menandai transisi penting dalam sejarah pendidikan Indonesia dari era Orde Lama ke Orde Baru. Kedua, kebijakan-kebijakannya membentuk landasan bagi sistem pendidikan nasional yang masih relevan hingga kini. Ketiga, pemahaman tentang periode ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi pengembangan kebijakan pendidikan di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kebijakan-kebijakan pendidikan yang dikeluarkan Mashuri Saleh selama masa jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1968-1973). Fokus utama akan diberikan pada konteks historis yang melatarbelakangi kebijakan-kebijakan tersebut, proses implementasinya, serta dampaknya terhadap perkembangan pendidikan Indonesia.⁷ Salah satu kebijakan signifikan yang diimplementasikan Mashuri Saleh adalah pengesahan penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) pada 23 Mei 1972, yang menggantikan Ejaan Soewandi.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kebijakan pendidikan Indonesia pada masa awal Orde

⁵ Parakitri Tahi Simbolon, *Menjadi Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 1995), hal. 234.

⁶ Nasution S, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 187.

⁷ Abu Ahmadi, *Sejarah Pendidikan*, (Semarang: CV Toha Putra, 1975), hal. 89.

Baru, khususnya selama periode kepemimpinan Mashuri Saleh. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian sejarah pendidikan Indonesia dan menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan pendidikan di masa mendatang.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, untuk memfokuskan penulisan ini, maka diari itu, dibuat batasan-batasan dengan merumuskan beberapa masalah, diantaranya:

1. Bagaimana biografi Mashuri Saleh dan Keadaan Pendidikan sebelum masa Orde Baru?
2. Bagaimana kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Mashuri Saleh selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1968-1973?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan berbagai data yang membahas mengenai Kebijakan Mashuri Saleh terhadap Pendidikan Indonesia (1968-1973). Secara spesifik, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam bagian rumusan masalah. Oleh karena itu, dengan adanya rumusan masalah tersebut, penetapan tujuan penulisan menjadi hal yang esensial. Tujuan penelitian diantaranya, yaitu:

1. Untuk mengetahui biografi Mashuri Saleh dan Keadaan Pendidikan sebelum masa Orde Baru
2. Untuk menganalisis kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Mashuri Saleh selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1968-1973.

⁸ Muhammad Said dan Junimar Affan, *Mendidik dari Zaman ke Zaman*, (Jakarta: Jemmars. 1987), hal. 156.

D. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian mengenai Kebijakan Mashuri Saleh terhadap Pendidikan Indonesia (1968-1973), tidak begitu saja disusun tanpa adanya sumber informasi sebagai media pendukung dalam melakukan penelitian ini. Adapun sumber-sumber yang dirasa jelas untuk dijadikan sebagai rujukan penelitian, diantaranya:

1. Buku yang ditulis oleh Ening Herniti dengan judul *Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia (Dari Masa Pemerintahan Belanda Hingga Masa Pemerintahan Joko Widodo)* pada tahun 2019. Buku ini membahas sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia secara komprehensif, mulai dari masa pemerintahan kolonial Belanda hingga era pemerintahan Joko Widodo. Pembahasan mencakup berbagai perubahan ejaan yang terjadi, termasuk Ejaan van Ophuijsen, Ejaan Soewandi, Ejaan Pembaharuan, Ejaan Melindo, Ejaan LBK, Ejaan yang Disempurnakan (EYD), hingga Ejaan Bahasa Indonesia (EBI). Buku ini menggunakan pendekatan historis dan analitis untuk menelusuri evolusi ejaan bahasa Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ejaan, serta implikasinya terhadap perkembangan bahasa dan pendidikan di Indonesia. Buku ini menawarkan pemahaman mendalam tentang sejarah dan dinamika perubahan ejaan bahasa Indonesia, yang penting bagi akademisi, pendidik, dan praktisi bahasa dalam memahami konteks historis dan perkembangan bahasa Indonesia. Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis berfokus pada kebijakan-kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Mashuri Saleh selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada periode 1968–1973. Salah satu kebijakan penting yang diimplementasikan adalah pengesahan penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) pada 23 Mei 1972, yang menggantikan Ejaan Soewandi.

2. Skripsi yang ditulis oleh Emilia Palupi Nurjannah *Pendidikan Orde Baru: Kebijakan Pendidikan Masa Menteri Fuad Hassan (1985 – 1993)*. Penelitian ini membahas mengenai kebijakan Pendidikan di Indonesia pada masa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan yang memimpin pada periode 1985-1993. Penelitian ini menyoroti kebijakan pendidikan di masa Orde Baru yang lebih lanjut dan berkembang, dengan memeriksa dampaknya terhadap sistem pendidikan Indonesia selama periode tersebut. Penelitian ini mencakup periode 1985-1993, ketika Orde Baru sudah lebih stabil dan kebijakan pendidikan cenderung lebih sistematis dengan fokus pada pembaruan kurikulum, pemerataan pendidikan, dan penekanan pada pendidikan berkarakter nasionalisme. Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis berfokus pada kebijakan Pendidikan pada masa Mashuri Saleh yang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa awal orde baru yang dimana kebijakannya berkaitan dengan modernisasi Pendidikan, seperti penataan sistem Pendidikan yang lebih terstruktur dan upaya untuk meningkatkan kualitas Pendidikan dasar dan menengah.

3. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Safei dan Hudaidah dengan judul *Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968-1998)* memiliki cakupan yang luas dan komprehensif. Fokus utamanya adalah mengkaji struktur pendidikan nasional secara holistik, termasuk kebijakan kurikulum, program wajib belajar, sentralisasi pengelolaan pendidikan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-sosiologis untuk memahami bagaimana sistem pendidikan berfungsi dalam mendukung agenda pembangunan nasional serta menjadi alat untuk memperkuat ideologi Pancasila. Sebagai contoh, Safei dan Hudaidah membahas fenomena indoktrinasi nilai-nilai kebangsaan melalui kurikulum, kesenjangan akses pendidikan antar daerah, dan integrasi pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Rentang waktu yang panjang (1968-1998) membuat studi ini mampu menangkap dinamika transformasi sistem pendidikan dari fase awal Orde Baru hingga keruntuhannya.

Adapun penelitian yang penulis lakukan tentang Kebijakan Menteri Pendidikan Mashuri Saleh (1968-1973) lebih spesifik dan terbatas. Objek analisisnya adalah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Mashuri Saleh selama menjabat sebagai menteri pendidikan pada lima tahun pertama Orde Baru.

4. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Heni Yuningsih yang berjudul *Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru* pada tahun 2015. Penelitian ini berfokus pada kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan selama era Orde Baru (1966-1998). Penelitian ini mengkaji kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pendidikan agama Islam, baik dalam sistem pendidikan formal maupun non-formal di Indonesia. Penelitian ini juga membahas bagaimana kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru membentuk kurikulum pendidikan agama Islam, pengaruh ideologi Negara terhadap pendidikan Islam, serta upaya untuk memperkenalkan dan mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam sistem pendidikan nasional. Penelitian ini lebih menyoroti pendidikan Islam dan kebijakan terkait yang diterapkan selama masa Orde Baru. Penelitian ini memiliki kerangka waktu yang lebih luas, mencakup kebijakan pendidikan Islam selama masa Orde Baru secara keseluruhan (1966-1998), sehingga topiknya bisa mencakup berbagai perubahan yang terjadi selama periode tersebut. Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis bahas yaitu tentang Mashuri Saleh lebih menyoroti kebijakan pendidikan secara nasional dalam periode yang lebih singkat, serta peran beliau dalam pembaharuan sistem pendidikan di Indonesia.

E. Langkah – Langkah Penelitian

Metode yang penulis lakukan yaitu menggunakan metode sejarah⁹. Penulis menggunakan langkah-langkah pendekatan kualitatif dan deskriptif dalam

⁹ istilah "metode" berasal dari bahasa Yunani "*methodos*", yang berarti "jalan" atau "cara", istilah "metode" mengacu pada ilmu yang membahas tentang bagaimana atau bagaimana melakukan

penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Namun, sumber yang paling umum dalam penulisan ini adalah tulisan. Adapun tahapan metode penulisan diuraikan sebagai berikut:

1. Heuristik

Dalam tahapan heuristik¹⁰, penulis berusaha mencari sumber dengan jalan studi pustaka (Library Research) ke beberapa perpustakaan yaitu:

- a. Perpustakaan Dispusipda Jawa Barat
- b. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- c. Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia
- d. Arkib Negara Malaysia berbasis online (*Online Finding Aid (OFA)*)
- e. Perpustakaan Nasional
- f. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
- g. Museum Pendidikan Nasional UPI

Sumber yang diperoleh merupakan sumber primer berupa buku dan sumber sekunder berupa skripsi dan dan jurnal. Diantaranya yaitu:

penelitian atau, jika disederhanakan, metode penelitian adalah ilmu yang membahas tentang cara mencari sumber-sumber sejarah yang kemudian akan diolah menjadi narasi sejarah (Sulasman,2014).

¹⁰ Heuristik merupakan langkah pertama dalam melakukan penelitian menggunakan metode historis. Istilah ini berasal dari kata Yunani "*heuriskein*" yang berarti "mencari," yang tidak hanya berarti "menemukan sumber-sumber historis," tetapi juga mencari terlebih dahulu. Pada tahap heuristik, penulis berusaha mencari dan menemukan sumber-sumber historis, baik yang ditemukan di lokasi penelitian maupun dari temuan objek dan wawancara lisan (Sulasman,2014).

a. Sumber Primer

Melalui studi kepustakaan, penulis telah menemukan sumber primer¹¹ yang didapatkan yaitu berupa Dokumen Pemerintah dan Arsip Resmi, Buku laporan dan Surat Resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta benda/visual yang berupa foto.

1) Sumber Tulisan

a) Arsip

- (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1972 Tentang Peresmian Berlakunya "Ejaan bahasa Indonesia Yang disempurnakan"
- (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1969 tentang Pembentukan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Inspektorat Jenderal.
- (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1969 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Pendidikan Pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 069/1968 tentang Kedudukan Lembaga Nasional untuk UNESCO.
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Malaysia

b) Buku

- (1) Mashuri Saleh, *Laporan Lima Tahun Departemen Pendidikan dan*

¹¹ Sumber Primer merupakan bukti sejarah mengenai sebuah peristiwa. Sumber tersebut bisa berupa peninggalan – peninggalan atau catatan yang berupa rekaman maupun tulisan, juga wawancara yang bisa dilakukan sebagai sumber primer dalam bentuk lisan (Sjamsudin, 2007).

Kebudayaan 1968-1972. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1973)

(2) Mashuri Saleh, *Kebijaksanaan dan Langkah -Langkah Pembaharuan Pendidikan. (Humas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1973)*

(3) Kumpulan Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 1972/1973. (Biro Personalia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1973)

2) Sumber Benda/Visual

a) Foto Mashuri Saleh sebagai Menteri Pendidikan pada masa Kabinet Pembangunan I jaman Orde Baru (6 Juni 1968 – 28 Maret 1973)

b) Foto Mashuri Saleh sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengunjungi Pelantikan Rektor IKIP Bandung pada tanggal 12 Juli 1971

c) Foto Encik Hussein Onn dan Bapak Mashuri Saleh menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelajaran dan Kebudayaan di antara Indonesia dan Malaysia di Kuala Lumpur Tahun 1972

d) Foto serah terima jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mashuri Saleh S.H. kepada Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro

e) Foto Mashuri Saleh sedang berpidato di depan Mahasiswa UGM

b. Sumber Sekunder

Dengan adanya sumber sekunder¹², dapat membantu serta mendukung penulis dalam membahas kebijakan Mashuri Saleh terhadap Pendidikan di Indonesia. Ada beberapa sumber sekunder yang merupakan tulisan orang-orang tentang Kebijakan

¹² Sumber sekunder merupakan sumber yang berasal dari kesaksian orang yang tidak melihat atau hidup sezaman dengan peristiwa sejarah (Gottchalk, 2003).

Mashuri Saleh baik berupa buku maupun artikel jurnal. Beberapa sumber sekunder yang berhasil penulis temukan dan kumpulkan diantaranya adalah:

- 1) Buku karya Gusti Asnan, dkk. *Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 1945 – 2018*. Jakarta: Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2018
- 2) Buku Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991
- 3) Buku karya Anhar Gonggong, dkk. *Sejarah Nasional Indonesia VII Lahir dan Berkembangnya Orde Baru*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993
- 4) Buku karya Abu Ahmadi, *Sejarah Pendidikan*. Semarang: CV Toha Putra, 1975
- 5) Buku karya S. Sumardi, dkk. *Menteri-menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sejak Tahun 1966*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1984
- 6) Buku karya Harimurti Kridalaksana, *Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*. Yogyakarta: Kanisius, 1991
- 7) Buku karya Nasution S, *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- 8) Buku karya H.A.R Tilaar, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995*. Jakarta: Grasindo, 1995.
- 9) Buku karya Wardiman Djojonegoro, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.

- 10) Buku karya Winarno Surakhmad, *Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.
- 11) Buku karya Muhammad Said dan Junimar Affan, *Mendidik dari Zaman ke Zaman*. Jakarta: Jemmars, 1987.
- 12) Buku karya Parakitri Tahi Simbolon, *Menjadi Indonesia*. Jakarta: Kompas, 1995.
- 13) Buku karya Priyo Budi Santoso, *Birokrasi Pemerintah Orde Baru*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.

2. Kritik

Setelah menemukan sumber-sumber, langkah selanjutnya dalam proses kritik adalah melakukan uji validitas. Uji ini mencakup keaslian (*authenticity*) sumber, kualitas (*credibility*), dan kebenaran (*validation*) sumber. Untuk mengetahui keaslian sumber, saya akan melakukan proses kritik eksternal. Sementara itu, untuk memperoleh kebenaran (kredibilitas/validitas) sumber, saya akan melakukan proses kritik internal.¹³

Untuk menerapkan kritik ini, sumber-sumber yang ditemukan oleh penulis adalah tulisan yang diperoleh dari situs web resmi dan juga dari salah satu perpustakaan swasta. Hal ini dapat dilihat dari sampul buku untuk memastikan keasliannya, apakah buku ini benar-benar asli atau tidak, selain itu dapat dicatat dari materi, judul, dan tahun terbit. Selain itu, penulis juga memeriksa isi dan membandingkannya dengan buku-buku lain untuk memastikan apakah informasi yang terdapat dalam buku tersebut sama dengan yang dijelaskan dalam buku-buku lain, sehingga penulis dapat memperoleh kebenaran dari buku tersebut. Berikut

¹³ Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), hal. 79-80.

adalah kritik eksternal dan internal terhadap sumber-sumber yang dilakukan oleh penulis.

a. Kritik Ekstern

Kritik eksternal berfungsi sebagai metode untuk menilai keaslian sumber yang ditemukan, menentukan apakah sumber tersebut asli, orisinal, atau sekadar reproduksi. Proses ini memeriksa integritas sumber, memastikan bahwa sumber tersebut tetap tidak berubah baik dalam bentuk maupun konten. Lebih jauh, evaluasi tersebut mempertimbangkan latar belakang penulis, termasuk konteks historisnya dan periode waktu saat karya tersebut dihasilkan. Dalam kasus dokumen tertulis, analisis menyeluruh terhadap berbagai elemen sangat penting, termasuk jenis kertas, tinta, gaya penulisan, bahasa, ekspresi, struktur kalimat, dan keseluruhan presentasi. Validitas keaslian ini dapat diuji secara ketat melalui serangkaian sedikitnya lima pertanyaan mendasar yaitu kapan, dimana, terbuat dari bahan apa, dan memastikan apakah sumber tersebut asli apa tidak.¹⁴

Penerapan cara kerja dari kritik ekstern di atas, penulis akan menerapkannya dalam penelitian ini berdasarkan dari sumber – sumber yang telah dikumpulkan dalam tahapan heuristik, yaitu sebagai berikut:

a) Sumber Tertulis

Dari sumber tertulis yang dikumpulkan dalam tahapan heuristik terdapat beberapa jenis yaitu dokumen negara, buku, dan juga majalah. Dokumen Negara yang berupa surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1969 tentang Pembentukan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Inspektorat Jendral. pada keterangan nomor surat juga terdapat keterangan tahun surat ini ditetapkan. Pada bagian bawah surat ini terdapat tanda tangan

¹⁴ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hal 105-107.

dan tanggal ditetapkannya surat keputusan ini. Yaitu pada tanggal 10 Juni 1969.

Selain memuat informasi mengenai tanggal ditetapkannya surat ini, pada bagian bawah surat ini yaitu bagian tanda tangan terdapat juga tempat ditetapkannya surat ini yaitu di Jakarta. Penulis mengetahui bahwa Jakarta memang tempat pembuatannya karena surat ini merupakan surat resmi negara yang sudah pasti dibuat di daerah Ibu Kota Negara Indonesia itu sendiri yaitu Kota Jakarta.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 48 Tahun 1969 dibuat oleh Presiden Republik Indonesia, yang pada waktu itu dijabat oleh Presiden Soeharto. Keputusan Presiden tersebut ditetapkan dalam masa Orde Baru, saat Soeharto memegang kendali pemerintahan setelah resmi menjabat sebagai Presiden RI pada tahun 1968. Seperti Keputusan Presiden lainnya, dokumen ini ditandatangani oleh Presiden sebagai kepala negara dengan dibantu oleh sekretaris kabinet atau pejabat terkait dalam penyusunannya. Keputusan Presiden merupakan bagian dari mekanisme resmi pemerintahan untuk menetapkan kebijakan atau keputusan yang bersifat nasional.

Bahan yang digunakan dalam surat Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1969 ini menggunakan kertas berkualitas tinggi yang tahan lama untuk keperluan dokumentasi jangka Panjang. Dokumen ini juga terdapat lambang Kepresidenan yaitu lambang bintang, padi dan kapas yang dimana lambang tersebut merupakan lambing Kepresidenan sejak tahun 1958. Hal tersebut relevan dengan tahun ditetapkannya Keputusan Presiden ini karena pada tahun tersebut masih menggunakan lambing yang sama.

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1969 ini penulis dapatkan melalui media *online* yaitu pada situs Database Peraturan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi berupa peraturan – peraturan resmi mulai dari

peraturan pusat hingga peraturan daerah. Keputusan Presiden ini penulis dapatkan dalam bentuk digital atau hasil *scan* yang kondisi tulisannya sedikit pudar namun masih bisa terbaca dan surat Keputusan Presiden ini ditandatangani langsung oleh Presiden Soeharto yang pada saat itu menjabat menjadi Presiden sejak tahun 1967 – 1998. Melalui tahapan kritik ekstern tersebut, Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1969 ini layak untuk digunakan.

b) Sumber Benda / *Visual*

Foto Mashuri Saleh sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengunjungi Pelantikan Rektor IKIP Bandung. Penulis tidak dapat menemukan informasi kapan foto ini dibuat, namun dalam foto Mashuri Saleh yang sedang berpidato di belakangnya terdapat tulisan “*Pelantikan Rektor IKIP Bandung 12 Djuli 1971*” dari tulisan tersebut penulis memperkirakan bahwa pada saat foto ini dibuat yaitu tanggal 12 Juli tahun 1971.

Foto ini penulis temukan di Museum Pendidikan Nasional UPI Bandung, yang dimana foto ini dilakukan di UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) yang dulu diberi nama IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) di Bandung. Orang yang memotret foto tersebut tidak diketahui karena di Museum Pendidikan Nasional UPI tidak terdapat keterangan mengenai informasi tersebut. Meskipun begitu, foto ini tetap penulis jadikan sebagai sumber yang layak karena merupakan salah satu koleksi dari Museum Pendidikan Nasional UPI.

Selain itu, foto Mashuri Saleh mengunjungi pelantikan Rektor IKIP Bandung ini berwarna hitam putih kekuningan yang relevan dengan tahun tersebut karena hasil foto kamera pada tahun tersebut masih belum berwarna seperti sekarang. Melalui tahapan kritik ekstern ini, Foto Mashuri Saleh sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengunjungi Pelantikan Rektor IKIP Bandung ini layak digunakan.

b. Kritik Intern

Kritik intern merupakan pengujian keabsahan atau kredibilitas suatu sumber dengan fokus pada aspek internal, yaitu isi sumber tersebut. Kritik internal ini dilakukan untuk menemukan kredibilitas atau ketidakakuratan sertifikasi suatu sumber berdasarkan beberapa faktor, yaitu Mengidentifikasi isi sumbernya, Peneliti harus mampu menentukan makna sebenarnya dari kesaksian, dan kebenaran.¹⁵ Apabila mampu menunjukkan tiga penyidikan tersebut dengan benar maka sumber tersebut kredibel untuk digunakan sebagai sumber penelitian.

a) Sumber Tulisan

Surat Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1969 adalah sumber resmi, karena diterbitkan oleh seorang pejabat yang berwenang, yaitu Presiden Republik Indonesia, yang saat itu dijabat oleh Suharto. Surat keputusan ini memiliki kekuatan hukum yang sah karena diundangkan melalui saluran resmi negara dan dipublikasikan dalam lembaran negara. Dengan demikian, keputusan tersebut memiliki status hukum yang tinggi dan dapat digunakan sebagai referensi yang sah dalam konteks sejarah maupun hukum Indonesia.

Suharto sebagai Presiden memiliki kapasitas untuk mengeluarkan keputusan-keputusan penting yang mengatur kehidupan politik dan pemerintahan di Indonesia. Dalam hal ini, sebagai kepala negara dan pemerintahan, Suharto jelas memiliki kewenangan untuk membuat keputusan tersebut. Surat Keputusan ini bertujuan untuk kelancaran tugas – tugas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dipandang perlu untuk membentuk Inspektorat Jendral pada Departemen tersebut.

Sebagai bagian dari pemerintahan yang otoriter, apakah Soeharto dan pemerintahannya bersikap transparan dalam proses pengambilan keputusan? Apakah ada tekanan atau kepentingan tertentu yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut? Sejarah mencatat bahwa di masa Orde Baru, kebijakan

¹⁵ Sulasman. *Metodologi Penelitian Sejarah: Teori, Metode, Contoh Aplikasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm.104.

seringkali diambil secara tertutup dan tidak melibatkan partisipasi publik secara terbuka. Dalam hal ini, Surat Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1969 adalah sumber resmi yang sah dan juga kredibel untuk digunakan.

b) Sumber Benda / *Visual*

Foto Mashuri Saleh sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengunjungi Pelantikan Rektor IKIP Bandung. Foto ini merupakan foto resmi karena penulis mendapatkannya di Museum Pendidikan Nasional UPI dan terdapat keterangan bahwa Mashuri Saleh yang pada saat itu menjabat menjadi Menteri Pendidikan berkunjung ke IKIP Bandung yang sekarang sudah berubah namanya menjadi UPI (Universitas Pendidikan Indonesia).

Kesaksian yang muncul pada foto tersebut yaitu adanya suatu rombongan yang penulis tidak mengetahuinya tetapi dalam foto tersebut Mashuri Saleh berjalan diiringi oleh dua orang di samping kanan dan dua orang di samping kirinya dan dibelakangnya terdapat rombongan orang berseragam rapi serta di tepi tepi jalannya itu di kawal oleh orang yang memakai atribut seperti tentara atau polisi. Foto tersebut berlatar belakang Gedung isola yang berada di IKIP.

Kredibilitas foto ini memiliki kebenaran karena keterangan pada foto tersebut bahwasannya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengunjungi pelantikan Rektor IKIP yang dimana dalam keterangan tersebut menyebutkan nama Mashuri Saleh yang menjabat pada saat itu. Selain itu, jika dikomparasikan dengan foto-foto lainnya pada masa tersebut sangat relevan dan jujur karena foto tersebut berwarna hitam putih kekuning-kuningan sehingga setelah melalui kritik intern tersebut, foto ini kredibel untuk digunakan.

3. Interpretasi

Setelah berhasil mengumpulkan berbagai sumber melalui tahapan heuristik dan memastikan keabsahannya melalui proses kritik sumber atau validasi, langkah berikutnya adalah fase interpretasi atau penafsiran.¹⁶ Interpretasi ini merupakan tahap ketiga dalam pemilihan sumber penelitian. Fungsinya adalah untuk menginterpretasikan fakta-fakta yang telah divalidasi dari sumber-sumber tersebut. Dalam konteks ini, penulis akan berupaya menganalisis dan menggali informasi mengenai Kebijakan Menteri Pendidikan Mashuri Saleh Terhadap Pendidikan Indonesia (1968 hingga 1973), dengan memanfaatkan pendekatan sejarah dan teori-teori yang relevan.

Penelitian ini menggunakan teori politik dan kebijakan publik yang digagas oleh David Easton serta teori *the great man* yang digagas oleh Thomas Carlyle karena kedua teori tersebut memberikan kerangka kerja yang memungkinkan untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan di Indonesia saat itu tidak hanya dipengaruhi oleh keputusan individu, tetapi juga oleh dinamika politik yang lebih besar.

Dalam bukunya, Easton menjelaskan bahwa kebijakan publik berfungsi sebagai respons terhadap permintaan dan tekanan dari masyarakat yang masuk ke dalam sistem politik, untuk kemudian diproses oleh pemerintah dan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk kebijakan yang dihasilkan.¹⁷ Sedangkan teori *the great man* atau manusia besar merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas dan dapat mengubah masyarakat manusia. Bukan hanya kemampuan intelektual mereka yang melakukan perubahan, tetapi juga cara mereka bertindak di masyarakat. Saat orang-orang besar bertindak, masyarakat menanggapi dan menyambutnya setelah itu, mereka terlibat dalam mengubah dan menggerakkan

¹⁶ Kartodirdjo, *Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hal. 63.

¹⁷ David Easton, *A Systems Analysis of Political Life* (New York: Wiley, 1965), hal. 14.

masyarakat.¹⁸ Dengan demikian, teori *the great man* berfungsi untuk menganalisis peran Mashuri Saleh sebagai individu dalam perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan pada periode tersebut.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam dunia pendidikan, seperti pemerataan akses pendidikan yang masih rendah, kualitas pendidikan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta ketidakmampuan sistem pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi. Tuntutan masyarakat untuk memperbaiki kualitas pendidikan menjadi input yang mendorong perubahan kebijakan pendidikan. Mashuri Saleh sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Orde Baru, dituntut untuk merespons kebutuhan masyarakat ini dengan kebijakan yang mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut.¹⁹

Para ilmuwan umumnya menyarankan agar studi sejarah politik tidak hanya berfokus pada narasi pergantian kekuasaan, melainkan juga menganalisis struktur-struktur jangka panjang, seperti sistem simbol, ritus, perilaku, dan mental politik, sehingga menjadi sejarah yang lebih struktural atau total.²⁰ Sejalan dengan pandangan ini, Teori Politik dan Kebijakan Publik serta teori *The Great Man* menyediakan kerangka teori yang kuat untuk meneliti kebijakan pendidikan Mashuri Saleh dari tahun 1968 hingga 1973. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi bagaimana kebijakan tersebut terbentuk tidak hanya dari keputusan pribadi Mashuri Saleh, tetapi juga sebagai hasil interaksi kompleks antara harapan publik, dinamika politik, dan strategi pemerintah yang lebih luas, sekaligus menyoroti hubungan timbal balik antara kebijakan dan respons masyarakat.

Dengan menerapkan sudut pandang teori ini, kita dapat melihat bahwa kebijakan pendidikan yang dirumuskan oleh Mashuri Saleh tertanam dalam kerangka politik yang lebih luas yang mencerminkan kecenderungan ideologis

¹⁸ Ajid Thohir dan Ahmad Sahidin, *Filsafat Sejarah: Profetik, Spekulatif, dan Kritis*, (Jakarta: Prenadamadia Group, 2019), hal. 84.

¹⁹ David Easton, *A Systems Analysis of ...* hal. 133.

²⁰ Ajid Thohir dan Ahmad Sahidin, *Filsafat Sejarah: Profetik, Spekulatif, dan Kritis ...*, hal. 12.

rezim Orde Baru selama era itu, dan kita juga dapat mengamati bagaimana kebijakan ini beradaptasi dan bertransformasi sebagai respons terhadap masukan pemangku kepentingan setelah penerapannya.²¹

4. Historiografi

Tahap Historiografi²² mencakup metode penulisan, penyajian, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah selesai. Tahap selanjutnya, yaitu penulisan sistematis hasil penelitian ini, dibagi menjadi empat bagian dan terdiri dari beberapa subbagian, yaitu:

BAB I Pendahuluan. Bab ini membahas beberapa poin yang akan dikaji diantaranya yaitu mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian.

BAB II membahas mengenai biografi dan karir Mashuri Saleh serta Keadaan Pendidikan sebelum masa Orde Baru.

BAB III membahas bagaimana kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Mashuri Saleh selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1968-1973 yang terbagi menjadi beberapa pembahasan yaitu Reformasi Kurikulum, Kebijakan Pendidikan, dan Peran Mashuri Saleh dalam Internasionalisasi Pendidikan.

BAB IV Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian ini.

²¹ David Easton, *A Systems Analysis of...* hal. 110.

²² Historiografi merupakan tahap terakhir setelah melalui serangkaian proses sebelumnya. Pada tahap ini, fakta-fakta sejarah yang dipilih dari berbagai sumber dikompilasi menjadi tulisan sejarah (Sulasman, 2007).